Kadis PTSP DKI Ingat Masyarakat Jangan Mendadak Urus SIKM

JAKARTA (IM) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta Benni Aguscandra mengingatkan warga agar tidak mengurus surat izin keluar masuk (SIKM) wilayah Jakarta secara mendadak. Sebab, permohonan SIKM saat ini banyak, sementara jumlah petugas yang memverifikasi permohonan tersebut terbatas."Diusahakan mengurus SIKM jangan mendadak, sebaiknya 2-3 hari sebelumnya," ujar Benni dalam dialog yang disiarkan langsung di akun YouTube BNPB Indonesia, Kamis (28/5).

Benni juga mengingatkan bahwa tidak semua orang bisa mendapatkan SIKM. Surat izin itu hanya akan diterbitkan untuk orang yang bekerja di 11 sektor yang diperbolehkan beroperasi selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Dia juga mengingatkan warga untuk tidak memalsukan SIKM. Orang yang memalsukan SIKM bisa dijerat Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara."Jangan sampai memalsukan dokumen karena sanksinya berat, melanggar UU ITE," kata Benni.

Hingga Rabu kemarin, ada 6.622 orang yang mengajukan SIKM. Rinciannya, 64 permohonan masih diproses, 682 permohonan menunggu validasi penjamin, 4.544 permohonan ditolak, dan 1.332 permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan sehingga SIKM dapat diterbitkan secara elektronik. ● **osm**

Tempat Usaha Konveksi di Tambora Ludes Terbakar

TAMBORA (IM) - Kebakaran melanda rumah warga di Jalan Kalianyar Raya, Kelurahan Kalianya, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, pada Kamis (28/5) dini hari. Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan kebakaran tersebut terjadi pada pukul 02.40 WIB.

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, Eko Sumarno mengatakan, kebakaran yang terjadi di Jalan Kalianyar VIII, Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian mencapai ratusan juta, karena telah menghanguskan bangunan berlantai tiga itu. "Tidak ada korban. Kami mengerahkan mobil pemadam dari Jakarta Barat 15 Unit, Komando 3 Unit dan Pusat 3 Unit langsung menuju lokasi," kata Eko saat dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Kata Eko, bangunan yang terbakar terdiri dari tiga lantai, lantai satu untuk tempat tinggal, lantai dua untuk sablon, dan lantai tiga untuk konveksi. Ia pun menduga jika kebakaran tersebut berasal dari korsleting listrik dari lantai dua.

"Beruntung saat kejadian pekerja langsung sigap dan berhasil mengevakuasikan diri. Saat ini api sudah padam," pungkasnya. ● **ber**

BP BATAVIA PROSPERINDO TRANS

PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Batavia Prosperindo Trans Tbk ("Perseroan"), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), pada hari Selasa, tanggal 07 Juli 2020.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ("POJK 15/20"), pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2020, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahas Indonesia yang berperedaran nasional, situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan (www.bataviarent.com).

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 pada pukul 16.00 WIB atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada tanggal 12 Juni 2020.

Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara Rapat apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 16 POJK 15/2020, dan usul tersebut harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu tanggal 15 Juni 2020, serta memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan jo. Pasal 16 POJK 15/2020 tersebut.

Menyikapi adanya Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Covid-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia serta mengacu Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 perihal Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan No.S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 perihal Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas pemberian kuasa secara elektronik yang disediakan pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Jakarta, 29 Mei 2020
Direksi Perseroan
PT BATAVIA PROSPERINDO TRANS Tbk

IDN/ANTARA

PERSIAPAN SHALAT JUMAT
Sejumlah petugas mempersiapkan penanda jarak untuk persiapan pelaksanaan Shalat Jumat di Masjid Agung Al Barkah kota Bekasi, Kamis (28/5). Sejumlah persiapan dilakukan untuk melaksanakan Shalat Jumat di tatanan baru untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta akan Terapkan *New Normal*, DPRD DKI: Bisa Jadi Bom Waktu

Mengingat jumlah penularan virus korona di wilayah DKI Jakarta masih tinggi, sebaiknya rencana membuka kembali proses belajar mengajar di sekolah dipertimbangkan matang-matang.

JAKARTA (IM) - Sekretaris Fraksi DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, menilai wilayah Ibu Kota belum pantas menerapkan sistem New Normal, di tengah pandemi virus korona atau Covid-19. Pasalnya, dalam dua minggu terakhir, Pempov DKI belum melakukan tes Covid-19 secara massal.

"Jangan buru-buru, DKI belum lakukan tes Covid-19 secara massal dalam dua minggu terakhir. Ini bahaya, bisa jadi bom waktu," kata Yani dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5).

Ia menjelaskan, alasan pihaknya menolak new normal tak diterapkan di Jakarta karena tingkat kedisiplinan masyarakat saat masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) saja masih ternilai amat rendah, walaupun telah dilakukan sosialisasi secara masif. Sedangkan, sosialisasi terkait normal baru masih sangat kurang.

"Pertama, masyarakat belum disiplin dalam mematuhi aturan PSBB padahal sosialisasinya sudah sangat masif, apalagi ini (normal baru) yang masih belum jelas. Pemerintah harus hati-hati dalam membuat kebijakan," katanya.

Ia mengakui, pihaknya memahami kesulitan yang dihadapi Pemprov DKI saat ini, salah satunya adalah permasalahan ekonomi. Tapi, tetap keselamatan jiwa masyarakat justru yang harus lebih diutamakan.

"Kalau masyarakat ditanya, jawabannya pasti mau kerja lagi, cari nafkah lagi buat keluarga. Tapi pemerintah DKI punya hitung-hitungan risikonya. Saya hanya mengingatkan, dampaknya akan luar biasa jika wabah di DKI jadi tidak terkendali," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku akan mengerahkan pasukan TNI-Polri secara masif di 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota, guna mendisiplinkan protokol kesehatan demi mempersiapkan new normal.

Empat provinsi yang sedang disiapkan untuk melakukan new normal yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Gorontalo.

Pembukaan Sekolah

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana, mengatakan, pembukaan sekolah akan dilakukan bila wilayah Ibu Kota sudah dinyatakan aman dari pandemi virus korona atau Covid-19.

Nantinya, protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 harus dipatuhi oleh seluruh peserta didik dan para pendidik. "Pembukaan sekolah akan dilakukan apabila kondisi (Jakarta) dinyatakan aman (dari Covid-19) dan pelaksanaannya sesuai dengan protokol kesehatan," kata Nahdiana kepada wartawan, Kamis (28/5).

Diketahui, Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 467 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021 menyebutkan bahwa aktivitas sekolah di Jakarta akan kembali dibuka mulai 13 Juli 2020.

Saat ditanya ihwal ada kemungkinan dimundurkan jadwal pembukaan sekolah, karena mengingat Jakarta masih terus ditemukan kasus baru Covid-19, Nahdiana tak menjawab pertanyaan tersebut.

Ia mengaku kini pihaknya sedang fokus mempersiapkan segala sarana dan pra sarana untuk menjalani kebijakan tersebut.

"Kami sedang lakukan persiapan saran pembelajaran yang tetap memperhatikan jaga jarak aman," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta Dinas Pendidikan (Disdik) mengkaji kembali rencana mengaktifkan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah mulai 13 Juli 2020. Pasalnya, Ibu Kota masih belum ada tanda-tanda bebas dari Covid-19.

"Saya kira itu (harus dikaji lagi). Intinya jangan buru-buru. Contohnya, tingkat terpaparnya di lingkungan sekolah seperti apa? Dampak penularan terhadap anak-anak seperti apa?" kata Taufik kepada wartawan, Kamis (28/5). ● **osm**

Bersiap *New Normal*, MRT Ajukan Tambahan Jumlah Maksimal Penumpang

JAKARTA (IM) - PT Moda Raya Transportasi (MRT) Jakarta mulai menyiapkan protokol kesehatan yang akan diterapkan jika skenario New Normal diberlakukan di Ibu Kota.

Corporate Secretary Division Head PT MRT Jakarta Muhammad Kamaluddin menjelaskan, persiapan protokol itu untuk mengantisipasi peralihan akhir masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ke pola hidup normal baru. Salah satunya adalah menyesuaikan kembali jumlah maksimal penumpang per gerbong yang saat ini sudah diajukan ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Maksimal penumpang saat ini 60 orang per kereta. Jika disetujui Dinas Perhubungan DKI, jumlah penumpang bisa naik jadi 63 sampai 68 orang per kereta," ujarnya, Kamis (28/5).

Selain itu, peraturan bagi penumpang yang sudah berlaku salama PSBB juga akan lebih dipertegas. Seperti kewajiban masker dan jaga jarak fisik antar penumpang mulai dari memasuki area stasiun maupun di dalam kereta MRT.

"Wajib physical distancing minimum 1 meter antar penumpang. Wajib cek suhu badan. Kemudian himbauan untuk cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer," ungkapnya.

Kammal menambahkan, pihaknya juga sudah menyiapkan standar operasional prosedur (SOP) untuk melakukan evakuasi jika ada penumpang yang sakit. SOP tersebut dipersiapkan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinyapenularan Covid-19 saat melakukan pertolongan kepada penumpang.

"(Ada) SOP evakuasi jika penumpang pingsan di stasiun atau di kereta," kata Kamaluddin.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Presiden RI Joko Widodo melakukan tinjauan ke Stasiun MRT Bundaran HI, pada Selasa (26/5). Peninjauan itu dilakukan sebagai bagian dari persiapan penerapan tatanan normal baru yang dicanangkan oleh pemerintah di tengah pandemi Covid-19.

Kendati demikian Anies belum memastikan apakah DKI Jakarta akan langsung menerapkan skenario tersebut pada 4 Juni mendatang. Hal tersebut karena belum ada keputusan apakah PSBB tahap ketiga di Ibu Kota akan berakhir atau kembali diperpanjang.

"Bila perilaku masyarakatnya menahan diri, kemudian tingkat reproduksi virusnya turun dibawah 1, maka kita bisa mengakhiri (PSBB) 4 Juni. Tetapi bila tidak, kita harus memperpanjang," ujar Anies. ● **osm**

Wali Kota Bekasi Surati Kemendikbud Minta Keringanan Biaya Kuliah Warganya

BEKASI (IM) - Pemerintah Kota Bekasi meminta Pemerintah Pusat dapat merumuskan kebijakan terkait keringanan pembayaran biaya pendidikan bagi warga Kota Bekasi di tengah pendemi Covid-19.

Wali Kota Bekasi, Dr H Rahmat Effendi mengatakan secara resmi surat telah disampaikan pihaknya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nadiem Makarim pada tanggal 16 Mei 2020.

Surat dengan Nomor 420/3187/Disdik perihal penyampaian aspirasi pemuda dan mahasiswa atas dampak Covid-19 terhadap kemampuan membayar biaya pendidikan.

"Pemkot diminta menyampaikan rekomendasi ini kepada pemerintah pusat di antaranya agar ada keringanan membayar biaya perkuliahan untuk pemuda dan mahasiswa di Kota Bekasi," kata Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Kamis, (28/5). "Permohonan ini didasari hasil audiensi pemuda dan mahasiswa dengan Pemerintah Kota Bekasi pada 14 Mei 2020 di stadion Patriot Chandrabaga Kota Bekasi, Gate 4," sambungnya.

Dalam surat tersebut, kata Rahmat, terdapat dua poin permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Pertama, permohonan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan kebijakan dalam pembebasan biaya pendidikan selama satu tahun atau dua semester, akibat dari dampak Covid-19 melalui mekanisme subsidi kepada sekolah atau perguruan tinggi swasta, sehingga dapat meringankan beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat.

Dan kedua, permohonan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuka komunikasi dengan pemangku kebijakan pendidikan di daerah dan pemangku kepentingan kelembagaan. Pendidikan (yayasan pendidikan) dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang ditanggung masyarakat.

"Semoga menjadi pertimbangan Bapak Menteri melihat kondisi ekonomi masyarakat menurun di tengah pendemi Covid-19," ujar Rahmat Effendi berharap. ● **mdl**

GED COURIER & LOGISTICS

PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2019*	2018
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	6.446.147.948	7.024.446.536
Piutang usaha - setelah dikurangi akumulasi penyisihan penurunan nilai piutang sebesar Rp1.749.012.735 pada tahun 2019 dan Rp1.710.593.888 pada tahun 2018	12.798.330.552	9.723.314.660
Piutang lain-lain	5.000.000	-
Persediaan	112.055.100	108.201.159
Uang muka dan beban dibayar di muka	28.286.628.169	26.672.319.444
Jumlah Aset Lancar	**47.648.161.769**	**43.528.281.799**
ASET TIDAK LANCAR		
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp8.820.739.817 pada tahun 2019 dan Rp8.113.777.770 pada tahun 2018	1.411.402.468	2.061.593.452
Aset takberwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp94.103.125 pada tahun 2019 dan Rp36.562.500 pada tahun	188.346.875	98.437.500
Aset pajak tangguhan	1.322.069.121	1.167.312.377
Aset lain-lain	420.892.160	22.500.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	**3.342.710.624**	**3.349.843.329**
JUMLAH ASET	**50.990.872.393**	**46.878.125.128**

URAIAN	2019*	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO		
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		
Pihak ketiga	2.313.189.375	1.972.568.215
Pihak berelasi	499.583.130	469.309.484
Utang lain-lain	23.414.271	153.777.693
Beban masih harus dibayar	689.336.550	305.754.980
Utang pajak	418.458.586	753.910.359
Utang pembiayaan jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	120.918.951	160.695.373
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	**4.064.900.863**	**3.816.016.104**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang pembiayaan jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	27.804.420	148.723.371
Utang pihak berelasi	1.154.089.400	-
Liabilitas imbalan kerja karyawan	3.539.263.753	2.958.655.624
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	**4.721.157.573**	**3.107.378.995**
JUMLAH LIABILITAS	**8.786.058.436**	**6.923.395.099**
EKUITAS - NETO		
Modal saham - nilai nominal Rp100 per saham		
Modal dasar - 880.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 421.640.000 saham	42.164.000.000	42.164.000.000
Tambahan modal disetor	6.940.515.304	6.905.515.304
Defisit	(6.899.170.087)	(9.114.785.275)
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	**42.205.345.217**	**39.954.730.029**
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	**531.260**	**-**
JUMLAH EKUITAS - NETO	**42.204.813.957**	**39.954.730.029**
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS - NETO	**50.990.872.393**	**46.878.125.128**

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2019*	2018
PENJUALAN	75.622.705.756	63.362.413.566
BEBAN POKOK PENJUALAN	58.725.830.067	44.508.397.972
LABA KOTOR	**16.896.875.689**	**18.854.015.594**
Beban penjualan	2.744.883.048	2.743.277.231
Beban umum dan administrasi	10.918.037.870	12.556.582.796
LABA OPERASI	**3.233.954.771**	**3.554.155.567**
Laba penjualan aset tetap	41.000.000	22.500.000
Lain-lain - bersih	202.255.365	(41.519.615)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	**3.477.210.136**	**3.535.135.952**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(1.284.407.337)	(1.285.725.000)
Tangguhan	125.500.831	388.651.486
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	**2.318.303.630**	**2.638.062.438**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(132.143.200)	750.353.967
Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait	29.255.913	(187.588.492)
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	**2.215.416.343**	**3.200.827.913**
JUMLAH LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	2.318.502.475	2.638.062.438
Kepentingan Nonpengendali	(198.845)	-
JUMLAH	**2.318.303.630**	**2.638.062.438**
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	2.215.615.188	3.200.827.913
Kepentingan Nonpengendali	(198.845)	-
JUMLAH	**2.215.416.343**	**3.200.827.913**
LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	**5,50**	**7,10**

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	2019*	2018
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	72.509.271.017	61.769.935.489
Pembayaran kepada:		
Pemasok	(41.679.613.507)	(30.287.975.024)
Karyawan	(25.537.748.227)	(23.307.644.690)
Kegiatan operasional lainnya	(5.083.541.160)	(10.382.588.588)
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	**208.368.123**	**(2.208.272.813)**
ARUS KAS UNTUK AKTIVITASI INVESTASI		
Investasi penyertaan saham	(299.000.000)	-
Perolehan aset tetap	(277.756.557)	(732.314.462)
Perolehan aset takberwujud	(147.450.000)	-
Penjualan aset tetap	41.000.000	22.500.000
Uang muka pembelian tanah	-	(18.823.333.333)
Kas Neto yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	**(683.206.557)**	**(19.533.147.795)**
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN		
Pembayaran utang pembiayaan	(160.695.373)	(178.130.357)
Setoran modal Entitas Anak oleh Kepentingan Nonpengendali	16.000.000	20.000.000.000
Tambahan modal disetor	-	6.864.944.500
Kas Neto Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	**(144.695.373)**	**26.686.814.143**
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	**(619.533.807)**	**4.945.393.535**
KAS DAN BANK ENTITAS ANAK PADA SAAT AKUISISI	**41.235.219**	**-**
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	**7.024.446.536**	**2.079.053.001**
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**6.446.147.948**	**7.024.446.536**

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - NETO KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Defisit	Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	Kepentingan Nonpengendali	Jumlah Ekuitas - Neto
Saldo 31 Desember 2017	**22.164.000.000**	**40.570.804**	**(12.315.613.188)**	**9.888.957.616**	**-**	**9.888.957.616**
Penawaran umum dan perdana	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	-	20.000.000.000
Agio saham penawaran Perdana saham	-	6.864.944.500	-	6.864.944.500	-	6.864.944.500
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	3.200.827.913	3.200.827.913	-	3.200.827.913
Saldo 31 Desember 2018	**42.164.000.000**	**6.905.515.304**	**(9.114.785.275)**	**39.954.730.029**	**-**	**39.954.730.029**
Akuisisi Entitas Anak	-	-	-	-	(332.415)	(332.415)
Pengampunan pajak Entitas Anak	-	35.000.000	-	35.000.000	-	35.000.000
Laba komprehensif tahun berjalan	-	-	2.215.615.188	2.215.615.188	(198.845)	2.215.416.343
Saldo 31 Desember 2019	**42.164.000.000**	**6.940.515.304**	**(6.899.170.087)**	**42.205.345.217**	**(531.260)**	**42.204.813.957**

* Termasuk laporan posisi keuangan PT GED Lintas Indonesia, karena PT Trimuda Nuansa Citra Tbk memperoleh pengendalian pada tanggal 10 Oktober 2019 (Catatan 1b).

Catatan:

Informasi keuangan konsolidasian di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disusun oleh Manajemen Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (firma anggota jaringan Crowe Global), auditor independen, dengan opini tanpa modifikasian, sebagaimana tercantum dalam laporannya No. 00383/2.1051/AU.1/05/1029-1/1/IV/2020 tertanggal 15 April 2020 yang tidak tercantum dalam publikasi ini.

Informasi keuangan konsolidasian tersebut di atas tidak mencakup catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Jakarta, 29 Mei 2020
S. E & O

PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk
Direksi